

PERAN UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES DALAM MENGATASI PERMASALAHAN PENGUNGSI KOREA UTARA DI CHINA

Oleh Dwitanaya Puspitasari

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Dwitanaya.Puspitasari.2012@fisipol.umy.ac.id

Abstract

Paper ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana peran UNHCR dalam mengatasi permasalahan pengungsi Korea Utara di China. UNHCR merupakan organisasi Internasional yang diberi mandat oleh dewan PBB untuk memimpin dan mengkoordinasi langkah-langkah untuk memberikan perlindungan terhadap pengungsi. UNHCR bernegosiasi dengan Pemerintah China dalam menangani pengungsi Korea Utara yang ada disana, karena pengungsi Korea Utara mengalami kekerasan di China. Negosiasi menghasilkan hasil yang positif, Pemerintah China menerapkan the administration of exit and entry sebagai landasan hukum untuk menangani pengungsi Korea Utara.

This paper aims to analyze how UNHCR handle North Korean refugee problems in China. UNHCR as International organization which is given a mandate by United Nations to lead and to coordinate the steps to give protection for refugees. UNHCR negotiates with Chinese Government in handling North Korean refugees in there, because North Korean refugees is facing violances in China. The negotiation give positive result. Chinese Government apply “ The Administration of Exit and Entry” as a basic of law to handle the North Korean Refugees in China.

Keyword : Refugees, United Nations High Commissioner for Refugees, Human Rights

Pendahuluan

Pada tahun 1995 UNHCR mendirikan kantor di Beijing dengan persetujuan pemerintah, namun terdapat masalah internal dalam pemerintah China terhadap langkah-langkah UNHCR sehingga melarang UNHCR untuk mengakses langsung daerah perbatasan. China tidak memberikan akses UNHCR untuk masuk ke wilayahnya

karena China takut apabila China memberikan akses, UNHCR akan lebih leluasa dalam mengawasi situasi pengungsi di China dan akan mendirikan kamp-kamp pengungsi di China. Apabila hal itu terjadi, jumlah pengungsi yang masuk ke China akan bertambah banyak. Tertutupnya akses tersebut membuat UNHCR sulit untuk dapat memberikan bantuan kepada pengungsi secara transparan, namun sebagai organisasi yang diberi mandat untuk memberikan perlindungan terhadap pengungsi, UNHCR tetap membantu para pengungsi Korea Utara walaupun dengan cara sembunyi-sembunyi dari Pemerintah China.

Peran UNHCR dalam mengatasi Permasalahan Pengungsi Korea Utara di China

Pada tahun 1999 UNHCR berupaya untuk membantu 7 warga Korea Utara yang datang di kantor UNHCR Beijing untuk meminta suaka. (United Nations High Commissioner For Refugee , 2015). Ini merupakan pertama kalinya warga Korea Utara datang ke kantor UNHCR untuk meminta bantuan. Menurut UNHCR warga Korea Utara yang datang untuk meminta suaka pantas menerima bantuan dari UNHCR karena mereka dalam kondisi tertekan dan mengalami penyiksaan. UNHCR berupaya mencari solusi dengan melibatkan pihak yang berwenang seperti pemerintah China, namun UNHCR memiliki hambatan karena Pemerintah China tidak memberikan akses bagi UNHCR untuk masuk dan mencari tahu secara lebih mendalam tentang Pengungsi Korea Utara.

UNHCR terus mendesak pemerintah China untuk mengubah kebijakannya mengenai pengungsi. UNHCR berupaya untuk bertemu dengan pemerintah China, karena China termasuk negara yang menandatangani Konvensi Pengungsi dan Protokol 1951 yang artinya China harus mematuhi segala prinsip yang ada di dalamnya termasuk prinsip “ non-refoulement” yaitu pemulangan secara paksa dan harus memenuhi hak-hak pengungsi.

Pada tanggal 23 Maret 2006 UNHCR mengadakan pertemuan dengan Kementerian Luar Negeri China untuk membahas permasalahan pengungsi Korea Utara yang berada di China. UNHCR mengangkat konsep pengungsi “sur place” dalam

pertemuannya bersama pemerintah China. Pengungsi “ Sur Place “ adalah seseorang yang tidak tergolong sebagai pengungsi sewaktu tinggal di negaranya, namun statusnya berubah menjadi pengungsi dikarenakan keadaan yang terjadi di negara asalnya selama ia tidak berada di negaranya. Orang-orang Korea Utara melakukan perjalanan ke China bukan dengan tujuan untuk mencari makanan atau untuk menguasai dan merusak stabilitas perekonomian China, namun mereka datang ke China melainkan untuk mendapatkan hak-hak sebagai manusia yang tidak dapat mereka peroleh di negaranya. Kekerasan dan perlakuan yang tidak manusiawi mereka dapatkan dari pemerintah Korea Utara, olehkarena itu mereka berharap dapat mendapatkan perlindungan dari pemerintah China, dan dapat melanjutkan kehidupan mereka.

Di Korea Utara pemerintah sangat mengatur kehidupan warganya, mereka terpenjara di negaranya sendiri. Warga Korea Utara berusaha keluar dari negaranya sendiri untuk menyelamatkan diri dari kekejaman pemerintah Korea Utara, tanpa membawa bekal yang cukup seperti bahan makanan, uang dan pakaian untuk melanjutkan kehidupannya di China. Sebagian dari mereka menggunakan uang mereka untuk menyuap tentara China agar dapat masuk ke China, atau untuk membayar penduduk China agar tidak memberitahukan keberadaannya kepada pemerintah China. Alhasil, mereka tidak mempunyai uang dan mereka berusaha mencari-cari pekerjaan kasar seperti menjadi buruh.

Kedatangan pengungsi Korea Utara ke China bukan karena unsur kesengajaan mereka untuk mencari pekerjaan dan mencari makan, namun karena situasi di negaranya yang mendesak warga Korea Utara untuk berpindah ke China. Sesampainya di China mereka membutuhkan sesuatu untuk dapat bertahan hidup, sehingga mereka harus mencari pekerjaan, walaupun keberadaannya yang ilegal membuat mereka tidak dapat bebas memilih pekerjaan sesuai dengan keahliannya dan memilih untuk menjadi pekerja kasar. Alasan tersebut tidak sesuai dengan anggapan pemerintah China yang menganggap warga Korea Utara sebagai imigran ekonomi yang dapat mengganggu stabilitas perekonomian China. Pemerintah China takut dengan banyaknya warga Korea Utara yang masuk ke negaranya, akan menambah jumlah pengangguran di negaranya. Hal tersebut pasti menjadi beban bagi pemerintah China, namun dalam

pertemuannya selama 3 hari, China bersedia untuk membangun sistem kuasa nasional dan peraturan pengungsi nasional. (Statement to media by Mr. Antonio Guterres, 2006)

Negosiasi tersebut berjalan sangat jujur dan terbuka, yang artinya China bersedia menerima UNHCR dengan tangan terbuka. UNHCR sangat mendukung upaya China untuk pembangunan sistem kuasa nasional dan pengungsi nasional tersebut dengan upaya elaborasi pada undang-undang dan pelatihan pada sistem ini. UNHCR juga menerbitkan buku pegangan dalam bahasa China pada hukum pengungsi yang sangat membantu dalam penyusunan Undang – Undang China. Dalam hal ini UNHCR bersedia untuk mendampingi China dalam pembentukan sistem kuasa nasional dan peraturan pengungsi nasional tersebut.

UNHCR menekankan kepada China bahwa organisasinya bersifat murni kemanusiaan yang artinya tidak ada unsur politik dan tidak akan terlibat dalam politik. UNHCR tidak akan ikut campur dalam hubungan politik diantara semenanjung Korea, dan antara China dengan Korea Utara. UNHCR hanya fokus terhadap masalah pengungsi Korea Utara yang ada di China, yang sangat membutuhkan bantuan. Saat ini pengungsi Korea Utara di China berada dibawah tekanan yang sangat membutuhkan perlindungan dan solusi untuk penderitaan mereka. UNHCR berusaha mengubah pandangan China terhadap pengungsi Korea Utara yang selama ini mereka anggap sebagai imigran ekonomi, bukan sebagai pengungsi yang tidak layak untuk mendapatkan perlindungan.

Dalam pertemuannya bersama pemerintah China, UNHCR juga menekankan bahwa organisasinya bukan organisasi yang menangani migrasi, namun dalam setiap arus migrasi pasti terdapat orang- orang yang membutuhkan perlindungan. Oleh sebab itu mandatnya sangat relevan sebagai Perlindungan Internasional karena ada kemungkinan orang-orang yang akan kembali ke negaranya terancam mendapatkan penganiayaan. UNHCR menekankan kepada pemerintah China dalam pembentukan Sistem Suaka dibawah hukum China untuk memberikan perlindungan kepada pengungsi Korea Utara sesuai dengan Konvensi dan Protocol 1951. UNHCR selalu menjalankan fungsi pengawasan terhadap China, karena China termasuk dalam negara yang menandatangani Konvensi dan Protocol Pengungsi 1951.

Komisaris Tinggi UNHCR António Guterres memiliki hak istimewa untuk bertemu dengan Counsellor Negara, Mr. Tang Jiaxuan, Menteri Luar Negeri China Li Zhaoxing, beberapa anggota kabinet di Kementerian Urusan Sipil, Keamanan Publik, dan Perdagangan. Mereka membahas komitmen di setiap bidang dalam urusan pengungsi karena masalah ini adalah masalah yang kompleks, memerlukan komitmen dan keterlibatan bersama dan memastikan bahwa mampu mengembangkan kerjasama dengan baik dalam masalah pengungsi.

Dewan Negara China mempersiapkan dokumen - dokumen guna terciptanya peraturan pengungsi nasional. UNHCR terus mendukung otoritas Pemerintah China dan selalu memantau agar Undang – Undang tersebut sesuai dengan Hukum Internasional. Pertemuan tersebut tidak hanya menghadirkan para pejabat China melainkan juga beberapa para pengungsi Korea Utara yang ada di China.

The Administration of The Exit and Entry

Pertemuan antara UNHCR dan China membuahkan hasil yang positif. Dalam proses memperbaiki sistem pengungsi di negaranya, Pemerintah China telah mengizinkan para pengungsi Korea Utara untuk meminta bantuan kepada UNHCR di Beijing. (Article North Korean Understanding Migration and Closed Country, 2016) Para pengungsi diwajibkan untuk mendatangi Kedutaan Asing atau Konsulat China untuk penentuan status pengungsi yang akan digunakan untuk melanjutkan perjalanan ke negara ketiga seperti Korea Selatan, Thailand, atau Laos. Pada awal bulan Maret 2008 Pemerintah China memberikan izin kepada 40 pengungsi Korea Utara untuk melanjutkan perjalanan mereka ke Korea Selatan atau Amerika.

China menerapkan “ Administration of the Exit and Entry “ pada tahun 2013, yang diadopsi pada pertemuan Eksekutif 15 dari Dewan Negara pada tanggal 13 Juli 2013 dan berlaku pada tanggal 1 september 2013. (Foreigner Exit-Entry Administration Regulations of the People Republic of China , 2016) Administration of the Exit and Entry mempunyai tujuan untuk mengatur penerbitan Visa dan penyediaan layanan kepada orang asing yang tinggal atau yang saat itu berada di China. China mengatur mekanisme untuk mengkoordinasikan layanan dan administrasi sehubungan dengan

warga asing yang masuk dan keluar wilayah China dengan tujuan meningkatkan penataan keseluruhan, koordinasi, dan kerjasama dalam bidang ini.

Pada penerapan “ Administration of the Exit and Entry ”, UNHCR bersama-sama dengan pemerintah China khususnya Kementerian keamanan Publik dan Kementerian Luar Negeri memastikan bahwa sistem administrasi dalam penentuan status pengungsi sebagai dokumen sementara dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan standar dalam Konvensi dan Protocol 1951. UNHCR di China juga terus memberikan penyuluhan masalah hukum, bantuan sosial maupun material kepada para pengungsi Korea Utara. (2015 UNHCR Subregional Operations Profile-East Asia and the Pasific, 2016)

Pada pasal 46 dalam “ Administration Exit-Entry” menetapkan bahwa warga asing yang mengajukan status pengungsi, selama berjalannya proses penentuan diperbolehkan untuk tinggal di Cina berdasarkan sertifikat identitas sementara yang dikeluarkan oleh Badan keamanan publik. Warga asing yang diakui sebagai pengungsi dapat tinggal atau berada di Cina berdasarkan sertifikat identitas pengungsi yang dikeluarkan oleh Badan keamanan publik. Berdasarkan pasal tersebut dapat memberikan status hukum yang jelas bagi para pengungsi Korea Utara.

Dengan diterapkannya “ Administration of the Entry and Exit” diharapkan dapat menciptakan peraturan pengungsi nasional yang komprehensif, terutama penerapannya terhadap pengungsi anak – anak. Berdasarkan “ Administration of the Entry and Exit” pasal 46 pengungsi Korea Utara dapat tinggal sementara di China atau melanjutkan perjalanan ke tiganya, karena telah mendapatkan identitas sementara yang di keluarkan oleh pemerintah setempat. China telah mengizinkan 6 pengungsi Korea Utara untuk melanjutkan perjalanan mereka ke Korea Selatan setelah lama menetap di provinsi Shenyang dan Shanghai dengan memberikan identitas sementara agar mereka dapat berpindah ke negara lain. Hal ini menjadi bukti bahwa pemerintah China bersedia untuk bekerjasama dengan UNHCR dalam “mentreatment” para pengungsi Korea Utara.

Para pengungsi Korea Utara yang telah diberikan identitas sementara banyak memilih untuk melanjutkan hidupnya di Korea Selatan. Para pengungsi menilai mereka lebih mudah untuk beradaptasi di Korea Selatan, karena memiliki etnis dan bahasa

yang sama. Terdapat 26.483 pengungsi Korea Utara yang tinggal di Korea Selatan. (Challenges for Young North Korean Refugee, 2016) UNHCR juga mendirikan kantor di Seoul , karena banyaknya pengungsi Korea Utara yang memilih Korea Selatan sebagai negara ketiga setelah proses pemberlakuan identitas sementara selesai.

Berlakunya “ Administration of the Exit and Entry ” adalah proses awal keberhasilan China dalam memperbaiki sistem suaka nasional. Diterapkannya Administration of the Exit and Entry di China merupakan tanda bahwa China bersedia untuk membuka akses untuk para pengungsi yang ingin memperoleh perlindungan di negaranya. UNHCR terus mengawasi proses tersebut dan menghimbau China untuk lebih memperbaiki strategi – strategi yang lebih komprehensif mengenai pengungsi. Proses kedua yang harus di capai oleh China adalah mengenai Undang – Undang suaka nasional dimana Undang- Undang tersebut akan lebih melengkapi dalam proses pemberian suaka di China. Akhir tahun 2008 peraturan pengungsi di rancang dengan memasukkan kementerian terkait dan diserahkan kepada Dewan Musyawarah Negara.

Sebelum para pengungsi dapat tinggal sementara di China sesuai dengan “Administration of the Exit and Entry” , para pengungsi harus melalui tahap pengajuan “refugee status determination” (RSD) atau pengajuan status bagi para warga Korea Utara. UNHCR bersama dengan pemerintah China terus mengupayakan pemberian status terhadap warga Korea Utara, sesuai dengan prosedur yang tersedia. Prosedur ini menawarkan setiap individu pencari suaka berkesempatan untuk diwawancarai dengan menggunakan bahasa asal mereka oleh Official RSD dibantu oleh interpreter yang berkualitas, yang akan menilai status mereka. Para pencari suaka kemudian diberikan keputusan apakah status pengungsi mereka dapat diberikan atau tidak. Apabila pengajuan status pengungsi mereka di tolak, para pencari suaka dapat mengajukan banding. Apabila pengajuan mereka diterima, maka sesuai dengan “ Administration of the Exit and Entry” maka mereka akan mendapatkan identitas sementara untuk melanjutkan perjalanan mereka ke negara ke-tiga.

Upaya China juga terlihat saat menghadiri Konferensi Pengungsi dan Orang tanpa kewarganegaraan dalam memperingati 60 tahun ulang tahun Konverensi 1951 dan 50 tahun konvensi 1961 pada bulan Desember 2011, China berjanji akan mempercepat proses legislasi yang berkaitan dengan pengungsi. Untuk sementara , China telah

mengizinkan para pengungsi Korea Utara untuk tinggal secara ilegal di China , sambil menunggu proses pengajuan status pengungsi karena membutuhkan waktu yang lama. Tidak menutup kemungkinan dengan statusnya yang masih ilegal dimana mereka tidak mempunyai hak sangat rentan terhadap eksploitasi. Ini merupakan proses perbaikan sistem suaka China dengan tidak memulangkan pengungsi, namun dengan mengizinkan mereka untuk tinggal sementara di China menunggu proses pengajuan suaka .Dengan dukungan dan pantauan UNHCR , China berusaha untuk memberikan dokumen sementara untuk para pengungsi, akses layanan, dan perlindungan dari pemulangan paksa.

China takut akan banyaknya arus pengungsi Korea Utara yang masuk ke China akan mengganggu kestabilan perekonomian China. Pengungsi yang masuk ke China dalam kondisi tidak mempunyai pekerjaan dan tempat tinggal, kondisi tersebut menurut China adalah sebuah ancaman. Oleh sebab itu, menurut UNHCR pemberian dokumen sementara adalah solusi yang tepat saat ini. Pemberian dokumen sementara untuk para pengungsi Korea Utara dapat mengurangi jumlah pengungsi yang ada di China , dengan memberikan perlindungan perjalanan yang aman kepada mereka, tanpa harus memulangkan pengungsi ke negara asalnya yaitu Korea Utara.

Banyaknya desakan dari Organisasi – organisasi Internasional membuat China menyampingkan perjanjian bilateral antara Korea Utara – China dimana dalam perjanjian tersebut tertulis China harus mengembalikan warga Korea Utara yang masuk ke wilayah China secara ilegal. UNHCR sebagai fasilitator dan negosiator berhasil membuat China memperbaiki sistem pengungsi dan bersedia mengubah kebijakannya mengenai pengungsi di China atas dasar kemanusiaan dan sesuai dengan kesanggupan China dalam Konvensi dan Protokol Pengungsi 1951. China termasuk dalam negara yang menandatangani perjanjian tersebut, yang artinya China harus mematuhi segala aturan yang ada pada perjanjian tersebut.

UNHCR juga berupaya mendesak China untuk memperluas perlindungan khusus terhadap perempuan Korea Utara dan anak-anak sesuai dengan kewajibannya menurut hukum hak asasi manusia. Khususnya meminta China untuk lebih meninjau

situasi pengungsi wanita Korea Utara karena wanita mendominasi jumlah pengungsi yang ada di China, dan mereka rawan menjadi korban perdagangan manusia, perbudakan seks, dan pernikahan paksa yang banyak terjadi di daerah perbatasan dimana pengungsi itu berada

UNHCR selalu memonitor kepatuhan China terhadap konvensi dan protocol Pengungsi 1951 sebagai landasan untuk memberikan perlindungan terhadap pengungsi. UNHCR berharap China menindak pengungsi sesuai dengan Konvensi tersebut, khususnya wanita dan anak – anak. UNHCR telah meminta China untuk memastikan bahwa tidak ada anak yang dikembalikan ke Korea Utara karena resiko anak tersebut akan mendapatkan penyiksaan di negara asalnya sangatlah besar. UNHCR juga menyerukan akses kepada anak-anak pengungsi Korea Utara di Cina untuk kesehatan, pendidikan dan layanan dasar lainnya.

Atas dasar kemanusiaan China mengadopsi kebijakan baru dengan memberikan akses kepada anak – anak pengungsi Korea Utara untuk dapat menikmati akses pendidikan yang sama dengan anak- anak di China , namun Pemerintah tidak memberikan akses ini secara gratis hanya dengan membebaskan biaya minimum kepada mereka. Pada bulan Desember, terdapat 18 anak-anak pengungsi Korea Utara bersekolah di sekolah-sekolah China, walaupun terdapat kendala dalam hal ruangan dan bahasa. UNHCR berserta Pemerintah China akan terus memperbaiki sistem pendidikan untuk anak-anak pengungsi, agar mereka tidak kehilangan pendidikannya.

UNHCR tidak menawarkan solusi refoulement atau kembali ke negara asal secara sukarela karena kondisi tersebut sulit untuk dilaksanakan. Kondisi di Korea Utara dirasa belum stabil, masih banyaknya ditemukan kasus pelanggaran – pelanggaran Hak Asasi Manusia sehingga tidak memungkinkan para pengungsi Korea Utara mendapatkan kualitas hidup yang baik disana. Pemberian status dan dokumen sementara, dianggap sebagai solusi yang tepat untuk para pengungsi Korea Utara yang berada di China. Diberikannya dokumen sementara, artinya para pengungsi tidak akan merasa takut dengan ancaman akan dikembalikannya ke negara asalnya. Pemberian identitas sementara oleh Pemerintah China, menjadikan pengungsi Korea Utara bukan lagi sebagai pengungsi ilegal, namun pengungsi legal yang berhak mendapatkan perlindungan hukum dan terbebas dari eksploitasi.

UNHCR sebagai lembaga Internasional dibawah PBB yang diberi mandat oleh majelis umum PBB untuk memimpin dan mengkoordinasi langkah-langkah pemberian perlindungan terhadap pengungsi telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan teori peran dimana dalam teori peran dijelaskan perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menduduki suatu posisi yang mana ia telah berperilaku sesuai dengan sifat posisi tersebut dan dari perilaku yang ia lakukan dapat mengubah atau menghasilkan suatu kebijakan baru . UNHCR telah berhasil bernegosiasi dengan China untuk menetapkan kebijakan yang adil untuk para pengungsi Korea Utara yang membutuhkan perlindungan. Sebagai organisasi yang bergerak memberi perlindungan terhadap pengungsi, UNHCR berhak dalam melakukan pengawalan terhadap seluruh pengungsi di dunia, termasuk pengungsi Korea Utara di China.

China memberikan identitas sementara kepada para pengungsi Korea Utara yang artinya Pemerintah China juga menjaga stabilitas wilayahnya, karena dapat mengurangi jumlah pengungsi yang ada di China dalam waktu tertentu. Rasa takut China akan banyaknya pengangguran dari para pengungsi Korea Utara dapat terselesaikan dengan pemberian identitas sementara tersebut, karena dengan diberikannya identitas sementara para pengungsi Korea Utara dapat mencari pekerjaan sementara secara legal di China. Walaupun mereka tidak dapat memilih pekerjaan mereka secara bebas, namun para pengungsi China mendapatkan perlindungan di saat mereka bekerja. Status mereka yang legal berarti mereka telah dilindungi hukum yang ada di China. China juga dapat menjaga hubungan diplomatik antar negara khususnya bagi negara-negara yang juga menandatangani Konvensi dan Protokol Pengungsi 1951 karena selama ini negara-negara tersebut terus mendesak dan mengkritik Pemerintah China untuk mematuhi Konvensi dan Protokol 1951 dalam melindungi pengungsi Korea Utara karena China termasuk negara yang terlibat dalam Konvensi tersebut.

Kesimpulan :

UNHCR merupakan organisasi Internasional yang diberikan mandat untuk memberikan perlindungan kepada pengungsi. UNHCR menjamin bahwa pengungsi mendapatkan hak-haknya sesuai dengan Konvensi dan Protokol 1951 yang mengandung prinsip-prinsip pengungsi dan menjadi hukum dasar dalam memberi perlindungan

pengungsi. UNHCR berupaya untuk bernegosiasi dengan Pemerintah China untuk bersedia mengakui warga Korea Utara sebagai pengungsi yang harus memperoleh perlindungan dan bersedia untuk memberikan identitas sementara kepada pengungsi.

UNHCR bernegosiasi dengan China dan China mengizinkan UNHCR untuk masuk dan mengakses pengungsi Korea Utara yang ada di China. UNHCR berupaya untuk memantau China dan memberikan pengawasan kepada China, karena China termasuk dalam negara yang menandatangani Konvensi dan Protokol 1951. China bersedia untuk memperbaiki sistem suaka dan pengungsi di negaranya dengan menerapkan “ Administration of the Exit and Entry” .

Administration of the Exit and Entry memberikan identitas sementara kepada para warga Korea Utara untuk melanjutkan kembali ke negara ke-tiga, seperti Korea Selatan. China juga mengizinkan warga Korea Utara yang telah mendapatkan identitas sementara untuk tinggal sementara, menunggu proses pemindahan selesai. Tidak hanya pemberian identitas sementara bagi para warga Korea Utara, Pemerintah China juga memperbaiki perlindungannya terhadap wanita dan anak-anak karena mereka rentan terhadap penyiksaan.

Referensi

Article North Korea Understanding Migration and Closed County. (n.d.). Retrieved januari 17, 2016, from <http://migrationpolicy.org>

Cohen, R. (n.d.). *Hukum Perlindungan Pengungsi Korea Utara.* Retrieved januari 16, 2016, from <http://www.brookings.edu>

Foreigner Exit – Entry Administration Regulations of the Peoples Republic of China. (n.d.). Retrieved januari 17, 2016, from <http://lawanborder.com>

2015 UNHCR Subregional operations profile-East Asia and the Pacific. (n.d.). Retrieved januari 16, 2016, from <http://www.unhcr.org>

Statement to media by Mr. António Guterres, United Nations High Commissioner for Refugees, on the conclusion of his Mission to the People's Republic of China,

Beijing, 23 March 2006. (2006, Maret 23). Retrieved januari 17, 2016, from <http://www.unhcr.org>

Refugee, U. N. (n.d.). Universal Periodic Review : People's Republic of China. *Submission by the United Nations High Commissioner for Refugees For the Office of the High Commissioner for Human Rights' Compilation Report .*

Resettling in South Korea : Challenges for Young North Korean Refugee. (n.d.). Retrieved januari 16, 2016, from <http://en.asanist.org>